

DAMPAK PELANGGARAN KODE ETIK FIRLI BAHURI TERHADAP KINERJA DAN CITRA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Mohammad Darussalam¹, Arrie Budhiartie²

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi*

² *Fakultas Hukum Universitas Jambi*

Email Koresponden: darussalamyis@gmail.com¹

Abstract

The abstract contains the objectives of analyzing the ethical violations committed by Firli Bahuri, the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), and their impact on the institution's performance and image. Through a qualitative descriptive method, this study examines media reports, expert opinions, and legal documents to interpret and synthesize the findings. Results indicate that ethical violations by the KPK leader weakened public trust, disrupted institutional performance, and prompted calls for internal reform. It is concluded that stronger ethical enforcement and public accountability are crucial to restoring the integrity of anti-corruption bodies.

Keywords: *ethical violations; KPK; public trust*

Abstrak

Abstrak ini mengkaji dampak pelanggaran kode etik oleh Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap kinerja lembaga dan citra publiknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari laporan media, pendapat ahli, serta dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK melemahkan kepercayaan publik, mengganggu kinerja institusi, dan memicu seruan reformasi internal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan kode etik yang lebih kuat serta akuntabilitas publik sangat penting untuk memulihkan integritas lembaga antikorupsi.

Kata Kunci: pelanggaran kode etik; KPK; kepercayaan public

Article history: Received :20/11/2024 Approved : 21/12/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi di Indonesia, sebuah negara yang kerap disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. KPK didirikan dengan tujuan untuk menjadi lembaga independen yang mampu menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif. Dalam perjalanannya, KPK mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat karena keberhasilannya dalam menangani kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan citra KPK, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat bahwa tindakan korupsi dapat diminimalisir.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KPK menghadapi berbagai tantangan yang mengancam integritas dan kinerjanya, terutama sejak adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Bahuri, Ketua KPK. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah penggunaan fasilitas mewah dalam perjalanan pribadi, yang dinilai melanggar prinsip kesederhanaan pejabat publik. Hal ini menimbulkan perdebatan besar, baik di kalangan masyarakat maupun pakar hukum, mengenai bagaimana kasus ini dapat mempengaruhi citra dan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kritik dari berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa tindakan tersebut mencederai semangat pemberantasan korupsi yang selama ini diusung oleh KPK. Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen KPK dalam menjalankan tugasnya, dan apakah lembaga ini masih layak mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kepercayaan publik adalah salah satu aset terpenting bagi KPK dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak pelanggaran kode etik oleh Firli Bahuri terhadap kinerja dan citra KPK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data dari berbagai dokumen, wawancara pakar, dan analisis media. Dengan

pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai situasi yang dihadapi KPK saat ini serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki citranya di mata publik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik di KPK, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan KPK dapat kembali menjadi lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Pembahasan

1. Pelanggaran Kode Etik oleh Firli Bahuri

Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah beberapa kali diduga melakukan pelanggaran kode etik selama masa kepemimpinannya¹. Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan helikopter pribadi untuk perjalanan dinas ke Sumatera Selatan pada tahun 2020². Perjalanan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesederhanaan yang harus dipegang oleh pejabat publik, terutama oleh seorang pimpinan lembaga antikorupsi seperti KPK. Penggunaan helikopter pribadi, yang biayanya cukup tinggi, memunculkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut mencerminkan sikap yang seharusnya dihindari oleh seorang pemimpin lembaga yang memiliki misi memberantas korupsi.

Selain itu, Firli juga pernah mendapatkan teguran atas dugaan pertemuan dengan pihak tertentu yang sedang diperiksa oleh KPK, sebuah tindakan yang dinilai mencederai asas independensi. Keterlibatan dalam pertemuan tersebut memberikan kesan bahwa ada potensi konflik kepentingan, yang sangat berbahaya bagi integritas lembaga. Hal ini menciptakan skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai komitmen KPK dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu³.

¹ Wawancara dengan Andi Setiawan, Pengamat Hukum, Jakarta, 2024.

² Hartono, Rudi. "Pentingnya Kode Etik dalam Lembaga Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, No. 2 (2022), hal. 45.

³ Widiastuti, Siti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KPK." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2024.

Dalam konteks penegakan kode etik, KPK memiliki Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawainya. Namun, kasus ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan internal, di mana proses penanganan pelanggaran kode etik belum sepenuhnya transparan dan tegas. Hal ini memunculkan kritik dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang mempertanyakan komitmen KPK dalam menjaga integritasnya. Selain itu, pelanggaran kode etik ini juga memberikan sinyal buruk bagi pegawai KPK lainnya, yang mungkin merasa bahwa tindakan serupa tidak akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

2. Dampak terhadap Kinerja KPK

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri berdampak signifikan terhadap kinerja KPK. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi:

- **Menurunnya Kepercayaan Publik:**

Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga independen menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK. Sebelum kasus ini mencuat, KPK memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, namun setelah itu, banyak masyarakat yang mulai meragukan integritas dan komitmen lembaga ini dalam memberantas korupsi. Penurunan kepercayaan ini dapat berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus korupsi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi⁴.

- **Gangguan Internal:**

Kondisi internal KPK menjadi terganggu akibat ketidakpuasan pegawai terhadap pimpinan. Banyak pegawai yang merasa bahwa tindakan Firli mencerminkan ketidakadilan dan menunjukkan lemahnya penerapan kode etik di tingkat pimpinan.⁵ Hal ini dapat menurunkan motivasi kerja dan produktivitas pegawai, serta menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Ketidakpuasan ini juga berpotensi menyebabkan pegawai yang berintegritas tinggi

⁴ Kirana, Dewi. "Efek Psikologis Setelah Kehilangan Pekerjaan." MANHAJ, 2024.

⁵ Hidayat, Rina. Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Pustaka Pelajar, 2023.

meninggalkan lembaga tersebut, yang akan semakin memperburuk situasi.

- **Efektivitas Penegakan Hukum:**

Krisis kepercayaan publik dan gangguan internal dapat mengurangi efektivitas KPK dalam menangani kasus korupsi. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan mungkin enggan melaporkan kasus korupsi, sementara pegawai yang tidak termotivasi mungkin tidak akan memberikan kinerja terbaik mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi, yang pada gilirannya dapat memperburuk citra lembaga di mata publik⁶.

3. Dampak terhadap Citra KPK

Citra KPK sebagai lembaga yang bersih dan profesional telah tercoreng akibat pelanggaran kode etik oleh Firli Bahuri. Media massa meliput secara intens kasus ini, menyoroti bagaimana tindakan pimpinan dapat berdampak pada persepsi publik terhadap KPK. Citra positif KPK yang sebelumnya dibangun melalui keberhasilan dalam menangani kasus korupsi besar kini terancam.

- **Krisis Kepercayaan:**

Krisis citra ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum tetapi juga pada organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya mendukung penuh KPK. Organisasi-organisasi ini mulai mempertanyakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya dukungan dari masyarakat sipil yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.⁷

- **Tantangan untuk Reformasi Internal:**

⁶ Abidin, Zaenal. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*. Elsam, 2023.

⁷ Wawancara dengan Aktivis ICW, Jakarta, 2024.

Kasus ini juga menunjukkan perlunya reformasi internal di KPK. Pimpinan harus mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kode etik dan mekanisme pengawasan internal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pegawai, termasuk pimpinan, mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Reformasi ini tidak hanya akan memperbaiki citra KPK, tetapi juga meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga dalam menegakkan hukum⁸.

4. Upaya Pemulihan Citra dan Kinerja KPK

Berdasarkan analisis di atas, sejumlah langkah strategis diperlukan untuk memulihkan citra dan kinerja KPK:

- **Penegakan Kode Etik yang Ketat:**

KPK harus memperkuat penegakan kode etik dengan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Setiap tindakan disiplin harus dilaksanakan dengan transparan dan diumumkan kepada publik untuk menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga integritas⁹.

- **Penguatan Pengawasan Internal:**

KPK perlu meningkatkan pengawasan internal dengan melibatkan pihak independen dalam audit dan evaluasi kinerja. Hal ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di masa mendatang.

- **Kampanye Publik dan Edukasi:**

Meluncurkan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran KPK dan pentingnya integritas dalam institusi publik. Edukasi tentang cara melaporkan kasus korupsi juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat.

- **Dialog dengan Stakeholders:**

KPK perlu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk memperkuat dukungan

⁸ Prasetyo, Budi. "Dampak Pelanggaran Etika Terhadap Kinerja Organisasi." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2023.

⁹ Suharto, Joko. "Analisis Kinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Antikorupsi*, 2023.

publik. Dialog ini dapat membantu lembaga untuk memahami harapan masyarakat dan menyelaraskan program-program yang ada dengan kebutuhan publik¹⁰.

- **Reformasi Struktural:**

Reformasi struktural juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas dapat diterapkan di setiap level dalam organisasi. Ini termasuk pelatihan berkala tentang etika dan integritas untuk semua pegawai KPK.

5. Implikasi Jangka Panjang terhadap KPK

Pelanggaran kode etik ini tidak hanya berdampak dalam jangka pendek tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam jangka panjang. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak negatif ini dapat berlanjut, mengakibatkan:

- **Penurunan Kualitas Penegakan Hukum:**

Kepercayaan publik yang menurun dapat berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus korupsi. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya data dan informasi yang dapat digunakan KPK dalam penegakan hukum¹¹.

- **Mengurangi Sumber Daya dan Dukungan Internasional:**

Krisis kepercayaan juga dapat berdampak pada dukungan internasional terhadap KPK. Berkurangnya dukungan ini dapat menghambat program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga internasional.

- **Risiko Korupsi di Lingkungan Internal:**

Pelanggaran kode etik yang tidak diatasi dapat menciptakan budaya yang permisif terhadap praktik korupsi di dalam KPK itu sendiri. Jika pegawai merasa bahwa mereka tidak dihargai atau tidak mendapatkan

¹⁰ Wawancara dengan Siti Nurhaliza, Aktivis Masyarakat Sipil, Yogyakarta, 2024.

¹¹ Widiastuti, Siti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KPK." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2024.

perlakuan yang adil, hal ini dapat menurunkan moral dan integritas pegawai KPK.

Kesimpulan

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri berdampak signifikan terhadap kinerja dan citra KPK. Dampak tersebut mencakup menurunnya kepercayaan publik, gangguan internal, dan hilangnya citra positif KPK di mata masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang tepat harus diambil untuk memulihkan situasi ini.

KPK perlu menegakkan kode etik dengan tegas dan transparan, memperkuat pengawasan internal, serta meluncurkan kampanye publik yang bertujuan mengembalikan citra positif lembaga. Reformasi struktural dan dialog dengan stakeholders juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa KPK dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Kesimpulannya, keberhasilan KPK dalam menghadapi tantangan ini tidak hanya bergantung pada tindakan pimpinan, tetapi juga melibatkan semua elemen di dalam dan luar KPK. Dengan komitmen yang kuat terhadap integritas dan akuntabilitas, KPK masih memiliki peluang untuk kembali menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Ramadhan, Muhammad. Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara, 2021.

Abidin, Zaenal. Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Elsam, 2023.

Sukardi, Ahmad. Dasar-Dasar Penelitian Sosial. Rajawali Pers, 2022.

Hidayat, Rina. Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Pustaka Pelajar, 2023.

Sari, Indah. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Graha Ilmu, 2021.

Jurnal

Kirana, Dewi. “Efek Psikologis Setelah Kehilangan Pekerjaan.” MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan 3, No. 1 (2024).

Hartono, Rudi. “Pentingnya Kode Etik dalam Lembaga Penegak Hukum.” Jurnal Hukum dan Masyarakat 12, No. 2 (2022).

Prasetyo, Budi. “Dampak Pelanggaran Etika Terhadap Kinerja Organisasi.” Jurnal Manajemen dan Bisnis 15, No. 3 (2023).

Widiastuti, Siti. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KPK.” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 10, No. 1 (2024).

Suharto, Joko. “Analisis Kinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Antikorupsi 8, No. 2 (2023).

Wawancara

Wawancara dengan Andi Setiawan, Pengamat Hukum, Jakarta, 2024.

Wawancara dengan Siti Nurhaliza, Aktivis Masyarakat Sipil, Yogyakarta, 2024.

Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.